

**ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DALAM  
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN PADA BADAN LINGKUNGAN  
JHIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**EVI ANDIYANI**

**NIM : 128330164**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

## **ABSTRAK**

Suatu Pemerintahan yang baik (Good Governance) setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standart akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan Pemerintah yang baik (Good Governance). Dan dalam hal ini penulis menganalisis suatu prosedur akuntansi keuangan yang terdiri dari Neraca, Realisasi anggaran dan Catatan Laporan Keuangan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan apakah prosedur pencatatan akuntansi keuangan telah sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan melakukan penelitian Deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang ada hingga memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan perusahaan melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data tentang masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Akuntansi Keuangan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013-2014 belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP No.71 Tahun 2010. Pimpinan-pimpinan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah mengarahkan bahwa pada tahun 2014 dan tahun selanjutnya akan melakukan Prosedur Akuntansi Keuangan yang sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.

**Kata Kunci : Neraca, Realisasi Anggaran, Catatan atas Laporan Keuangan.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul **“Analisis Prosedur Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara”** yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area (UMA).

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Eddy Suriyanto dan Ibunda Jumini tercinta yang penuh dengan rasa kasih sayang telah mengasuh membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, membimbing, memberikan semangat, serta memberikan doa yang tiada hentinya berkorban dan memberikan nasihat dan dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Abang Kandung penulis Hermawan Syahputra S.H yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dan Adik Kandung penulis Deddy Setiyawan yang selalu mendoakan penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Yaqub Matondang selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Ihsan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Bapak Hery selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

6. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar,MSi dan bapak Drs.Halomoan Situmorang,AK,MMA  
Selaku dosen pembimbing Proposal serta sekretaris bapak M.Idris Dalimunthe, SE,MSi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini dan juga atas semua arahan dan bimbinganya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak M.Idris Dalimunthe,SE MSi selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menempuh studi di Universitas Medan Area.
8. Ibu Linda Lores, SE,MSi selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNiversitas Medan Area.
9. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Pegawai Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mempuh studi di Medan Area.
10. Ibu Dr.Ir.Hj.Hidayat Msi selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup.
11. Ibu Siti Bayu Nasution Msi Selaku Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
12. Bapak Exan Free Coco,R.S, Kom Selaku Bendahara Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
13. Bapak Mei Wasfi SH Seluruh Staff pegawai terutama bagian keuangan yaitu Abangda Irham Dhani Tanjung, abangda Teguh Syahputra,abangda Rizky Kembara Dhana,Kak Mila, Ibu Farida, Kak Leli Butet, Kak Ria, Kak Lia, Kak Rani, yang telah banyak membantu penulis dalam menyediakan data yang telah dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Abangda Arby, Abangda Mirwansyah, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

15. Yang tersayang Sahabat-sahabatku Husnun Hanifa, Miranti, Riski Ekawani, Asni Mawaddah, Ignatia Ompusunggu, Kurnia Aurianti, Nuraini, Putri Artika Suri, Dina Fachrunnisa, Ayusahputri, Rita Meliala, Dewi Rahmawati, Hamdan Rois Batubara, Abdi Prayogi dan Seluruh teman-teman semua yang tidak dapat penulis sebut namanya satu persatu yang terus menghibur dan telah memberikan bantuan saran-saran serta dukungan dan motivasi sehingga selesai skripsi ini
16. Papi Adhi Gumara serta teman-teman Modeling di Elmode Management yaitu Abangda Dheo, Abangda Firman, Wildan, Abangda Yudha Schoonhoven Abangda RIZky, Pumpy Reydinda, Fiah, Sasha, Devi, Clarita, Maya, Mayu, Maulana, Rafy yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses pembuatan skripsi ini
17. Dan Kepada Semua pihak yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukanya. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Medan, 2 Agustus 2016

Penulis

Evi Andiyani

NPM : 128330164

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian Akuntansi Keuangan.....	6
1. Pengertian Akuntansi Keuangan .....	6
2. Fungsi Utama Akuntansi Keuangan.....	
3. 7	
4. Jenis-Jenis Laporan Keuangan .....	7
B. Prosedur Akuntansi Keuangan .....	8
1. Pengertian Prosedur Akuntansi Keuangan .....	8
2. Instrumen Prosedur Akuntansi Keuangan .....	9

C. Pengertian Standart Akuntansi Pemerintah .....	13
1.Ketentuan Umum Standart Akuntansi Pemerintah.....	13
2.Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.....	13
D. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan .....	14
1.Pengertian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan .....	14
2.Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan.....	15
3.Tujuan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan .....	17
E. Penelitian Terdahulu .....	20
F. Kerangka Konseptual .....	22
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
B. Populasi dan Sampel.....	25
C. Definisi Operasional .....	26
D. Jenis Dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Hasil Penelitian .....	29
1. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup .....	29
2. Visi Dan Misi Badan Lingkungan Hidup .....	30
3.Flowchart Prosedur Akuntansi Keuangan .....	31

4. Prosedur Akuntansi Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Lingkungan Hidup .....	32
B. Pembahasan .....	46
1. Neraca .....	46
2. Laporan Realisasi Anggaran .....	47
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	49
4. Laporan Operasional .....	49
5. Laporan Arus Kas .....	49
6. Laporan Perubahan Ekuitas .....	49
7. Catatan Laporan Keuangan .....	50
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>		<b>HALAMAN</b>
II.I	Penelitian Terdahulu.....	20
III.I	Rencana Jadwal Penelitian.....	25



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
Kerangka Konseptual.....	23
Flowchart Prosedur Akuntansi Keuangan.....	31



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang tidak menyalurkan aspirasi nya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dan sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menganggap paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara

proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan Good Governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat yang memiliki celah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, Partisipasi karena adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai koordinator pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (realible) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Kertas kerja/laporan keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Badan Lingkungan Hidup sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada diwilayah kota Medan sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah pasal 232 ayat (5) disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Prosedur Akuntansi Dalam Penyusunan**

## **Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diasumsikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah pada skripsi ini adalah:

“Apakah Prosedur Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 ?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara Umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui apakah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 ?”

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat :

- a. Bagi penulis sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, serta untuk menambah pengetahuan khususnya tentang pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebagai tambahan literature akademis dalam pengembangan praktek akuntansi pemerintah terutama tentang system akuntansi keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lain yang sejenis
- c. Sebagai acuan dalam hal pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan bagi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori-Teori**

##### **1. Pengertian Akuntansi Keuangan**

Hery (1:2012) menjelaskan Akuntansi keuangan adalah suatu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyiapan laporan keuangan bagi pihak luar misalnya seperti pemegang saham, pemasok, kreditor dan investas dan lain-lain.

Husnan (21:2005) menjelaskan Akuntansi keuangan adalah suatu sistem yang mengatur berbagai macam pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan hingga menyusun laporan keuangan mengenai transaksi yang terjadi.

Sugaiarto (54:2002) menjelaskan Akuntansi keuangan yaitu salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan khususnya yang berhubungan dengan perubahan aset, ekuilitas maupun kewajiban perusahaan.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, akuntansi keuangan merupakan kegiatan yang meliputi proses pencatatan hingga penganalisaan data keuangan perusahaan dan produk yang dihasilkan dari kegiatan tersebut berupa laporan keuangan.



## **2.Fungsi utama akuntansi keuangan.**

Husnan (29:2005) menjelaskan Salah satu fungsi utama akuntansi keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan laporan yang dibuat, sehingga dapat melihat keadaan keuangan suatu perusahaan dan perubahan apa saja yang telah terjadi di dalamnya. Informasi mengenai keuangan perusahaan sangat dibutuhkan oleh manajemen karena dapat membantu untuk membuat atau mengambil keputusan, yang nantinya keputusan tersebut dapat mempengaruhi keadaan perusahaan.

## **2. Jenis-jenis laporan akuntansi keuangan.**

(Husnan 33:2005) menjelaskan Salah satu hasil dari kegiatan akuntansi yaitu berupa laporan keuangan. Lalu laporan ini nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Dan jenis-jenis laporan keuangan yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi diantaranya sebagai berikut ini:

1. Laporan arus kas merupakan jenis laporan yang dapat memberikan informasi mengenai penerimaan maupun pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu.
2. Laporan laba-rugi merupakan salah satu laporan yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi, yang dimana laporan ini dapat memberikan informasi mengenai hasil (laba-rugi) kegiatan suatu perusahaan selama periode tertentu.

3. Laporan neraca merupakan jenis laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan aset, ekuitas maupun kewajiban suatu perusahaan dalam satu periode tertentu.
4. Laporan ekuitas merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan ekuitas pemilik ataupun modal selama periode tertentu pada suatu perusahaan.
5. Catatan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang bersifat fisik keuangan ataupun non-keuangan. Laporan ini tujuannya untuk memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan.

## **B. Prosedur Akuntansi Keuangan**

### **1. Pengertian Prosedur Akuntansi Keuangan**

Donald E. Kieso (4:2007) menjelaskan Prosedur akuntansi keuangan adalah tata cara dari suatu proses pencatatan / Pembukuan (Akuntansi) dari Proses pencatatan transaksi, Jurnal, Buku Besar, Neraca Percobaan sampai menjadi Laporan Keuangan Perusahaan yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas serta Laporan Akuntansi Manajemen Keuangan lainnya.

Proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang timbul dari aktifitas operasional perusahaan, dari aktifitas investasi ataupun dari kegiatan pendanaan perlu disusun ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan proses

pencatatan / pembukuan (Akuntansi) sebagai dasar atau pegangan untuk petunjuk pelaksanaan operasional yang dalam hal ini dinamakan Standar prosedur operasional (Standard Operating Procedure) Keuangan dan Akuntansi.

## **2. Instrumen Prosedur Akuntansi Keuangan**

Donald E.Kieso (11:2007) menjelaskan Bagian Akuntansi sebagai pusat data Keuangan (Financial Data Centre) berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan secara lancar. Instrumen - instrumen yang diperlukan dalam Sistem Informasi Akuntansi antara lain :

### **a. Kebijakan akuntansi ( Accounting Policy)**

Untuk memberikan informasi yang relevan dan tingkat akurasi yang tinggi, maka dibuatkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pencatatan/pembukuan (Akuntansi) dari transaksi-transaksi yang terjadi. Kebijakan akuntansi tersebut sebagai pedoman dari perlakuan pencatatan transaksi dan untuk dijalankan secara konsisten. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

#### **1.Kesatuan Akuntansi**

Suatu induk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% saham berhak suara pada perusahaan lain, harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan yang memiliki 50% atau kurang saham berhak suara pada perusahaan lain, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendalian tetap ada.

Laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasikan seluruh anak perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:

- Pengendalian pada anak perusahaan bersifat sementara karena anak perusahaan khusus diakuisisi dengan tujuan untuk dijual kembali atau dialihkan dalam jangka pendek.
- Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga tidak mampu mengalihkan dananya kepada induk perusahaan.

## 2. Periode Akuntansi

Periode akuntansi mengacu pada siklus operasi normal Perusahaan yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun takwin.

## 3. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar Laporan Keuangan kecuali untuk laporan arus kas, adalah dengan aktual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (RP). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan pengelompokan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

#### 4. Konsolidasi

Laporan Keuangan Konsolidasi disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang meliputi posisi Keuangan, Hasil Usaha dan Arus Kas dari Induk Perusahaan & Anak Perusahaan yang secara ekonomis dianggap sebagai satu kesatuan usaha walaupun terpisah entitas hukumnya. Akun-akun Neraca yang saling berhubungan akan dieliminasi agar mencerminkan hasil usaha sebagai satu kesatuan akuntansi.

Laporan Keuangan Konsolidasi akan menggabungkan seluruh perusahaan yang dikendalikan oleh induk Perusahaan. Pengendalian dianggap ada apabila induk Perusahaan memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui anak perusahaan) lebih dari 50 % hak suara pada suatu perusahaan.

Walaupun kepemilikan hak suara hanya sebesar 50 % atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dibuktikan adanya salah satu kondisi sebagai berikut :

- Mempunyai hak suara yang lebih besar dari 50 % berdasarkan suatu perjanjian dengan investor
- Mempunyai hak untuk mengatur & menentukan kebijakan Finansial dan Operasional perusahaan berdasarkan Anggaran dasar atau perjanjian.
- Mampu menunjukan atau memberhentikan mayoritas pengurus Perusahaan

- Mampu menguasai suara mayoritas dalam Rapat Pengurus

## 5. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan dan mengungkapkan aktiva dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

### b. Kode Akun

Kode akun adalah suatu penamaan/penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi. Setiap jenis pos dalam satu sistem akuntansi harus memiliki kode atau nomor yang dapat dikelompokkan dalam 6 jenis kategori

### c. Standart Jurnal

Standar jurnal adalah pedoman dalam melakukan pencatatan /pembukuan (akuntansi) setiap transaksi keuangan, namun pada prakteknya standard jurnal tidak harus baku dan mutlak harus dilaksanakan dan tidak dapat dirubah, tetapi paling tidak dengan adanya standard jurnal, para pelaku pembukuan dapat menjadikan standard ini untuk pedoman penyeragaman dalam suatu perusahaan guna melakukan pencatatan/ pembukuan (akuntansi)

## **C. Standart Akuntansi Pemerintah**

### **1. Pengertian Standart Akuntansi Pemerintah**

Ikatan Akuntansi Indonesia (84:2004) menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

### **2. Ketentuan Umum Standart Akuntansi Pemerintah**

Ikatan Akuntansi Indonesia (85:2004) menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

### **3. Penerapan Standart Akuntansi Berbasis Akrua**

Ikatan Akuntansi Indonesia (87:2004) menjelaskan Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrua tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrua dimaksud tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan SAP Berbasis Akrua dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

#### **D. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**

##### **1. Pengertian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**

Terry D. Warfield (14:2007) menjelaskan Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN / APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penerbitan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) merupakan awal masing-masing pihak untuk bersama-sama mewujudkan good governance melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD oleh semua instansi pemerintah pengguna anggaran baik di pusat maupun daerah. Selama ini terdapat beberapa aturan yang digunakan sebagai rujukan pemerintah daerah dalam



penyusunan laporan keuangan. Ketidak seragaman ini akan membuat perbedaan dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.

Kondisi demikian membuat laporan keuangan pemerintah daerah tidak akan dapat memenuhi keterbandingan baik secara internal maupun eksternal. Padahal karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang disampaikan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang baru ini adalah dapat dibandingkan. Pasal 32 ayat (1) UU 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD / APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan Pasal 184 ayat (1) dan (3) UU 32 tahun 2004 intinya menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dari dua pasal tersebut di atas maka jelaslah pentingnya diterapkan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini direspon pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

## **2. Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan**

Hery (56:2012) menjelaskan Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penerapan standar ini menjadi sangat penting bagi entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan

upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan struktur pada suatu periode pelaporan. Pelaporan Keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban entitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dilaokasikan dan menentukan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### **3. Tujuan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan**

(Tanjung H. Abdul 71:2012) menjelaskan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang dari pungutan pajak dan pinjaman
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- c. Menyediakan informasi sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.

Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu, basis kas ( cash basis of accounting ) dan basis akrual (accrual basis of accounting). Dalam akuntansi

berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah (Kas Umum Negara / Kas Umum Daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (Kas Umum Negara / Kas Umum Daerah). Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrual adalah dalam peristiwa pada saat pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pajak (SKPP). Dalam basis kas, saat terbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan, karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan, walaupun pemerintah belum menerima kas atau pendapatan pajak tersebut.

## D. Penelitian Terdahulu

### Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Dhika Permana (2013)	Analisis Dan Sistem Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta	Bendahara Penerimaan Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta system dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menerapkan penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku

<p>Winda Puspita Sari (2010)</p>	<p>Analisa            Prosedur Akuntansi        Keuangan Pada                Badan Kepegawaian    Daerah Kota Padang</p>	<p>Penerapan        Prosedur Akuntansi        Keuangan pada Badan Kepegawaian Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pemendagri No. 13 Tahun 2006</p>
<p>Reno Julian Chandra (2012)</p>	<p>Analisis            Prosedur Akuntansi        Keuangan Daerah Pada        Badan Pemberdayaan Masyarakat        Dan Pemerintah        Desa Kabupaten Indragiri Hulu</p>	<p>Pada dasarnya prosedur pencatatan transaksi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Indragiri Hulu telah dilaksanakan, tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 karena masih ada beberapa tahapan- tahapan dari siklus akuntansi yang belum dilakukan.</p>

## **E. Kerangka Konseptual**

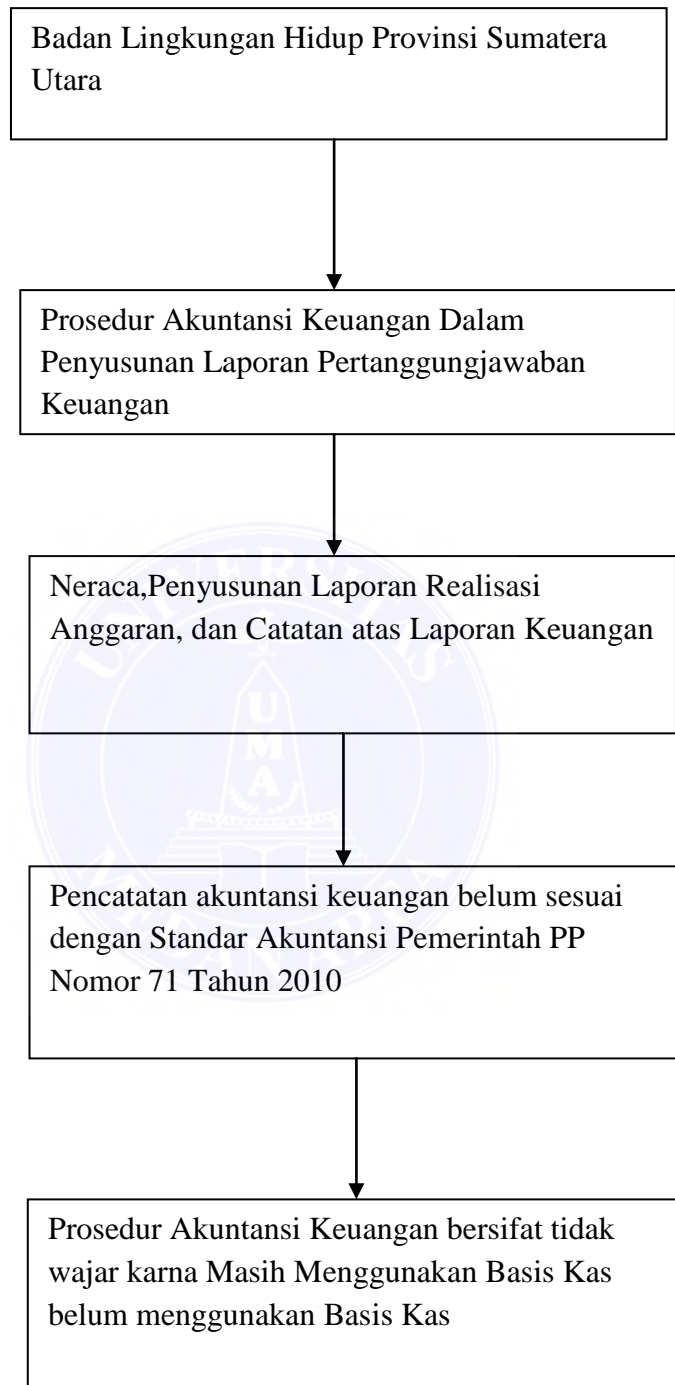
Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian. Konsep tak bisa diamati, tak bisa diukur secara langsung. Agar bisa diamati, konsep harus dijabarkan dalam variabel-variabel. Oleh karena itu perlu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian.

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangkamenjelaskan variabel yang diteliti. Dimana, kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. kerangka pemikiran/ kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongkrit. Adapun peranan teori dalam kerangka pemikiran yakni sebagai berikut :

- a. sebagai orientasi dari masalah yang diteliti
- b. sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu
- c. sebagai generalisasi, teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima
- d. sebagai peramal fakta, teori dapat melakukan peramalan dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui terhadap yang belum diketahui

Dengan adanya kerangka konseptual maka minat penelitian akan lebih terfokus ke dalam bentuk yang layak diuji dan akan memudahkan penyusunan hipotesis, sertamemudahkan identifikasi fungsi variabel penelitian, baik sebagai variabel bebas, tergantung, kendali, dan variabel lainnya dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait yang dapat mengarah pada standar-standar konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan-laporan keuangan.





**Gambar II.1 Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **G. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif. Menurut Nazir (2005:54) “Penelitian deskriptif yaitu cara merumuskan dan menafsirkan data yang ada hingga memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan perusahaan melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data tentang masalah yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis. Faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Jl.P.Diponegoro No.30, Medan, Sumatera Utara, Indonesia Telpn (061) 12042016.

##### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 yang digambarkan dalam table 3.1 dengan uraian kegiatan berikut dibawah ini :

**Tabel III.1**

**Rencana Jadwal Penelitian**

No	Jenis kegiatan	2015-2016							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pengajuan judul	■							
2.	Penyelesaian proposal		■	■	■				
3.	Bimbingan proposal			■	■				
4.	Seminar proposal			■	■				
5.	Pengumpulan data					■	■		
6.	Pengolahan data						■	■	
7.	Seminar hasil							■	
8.	Sidang Mejahijau								■

**H. Populasi dan Sampel**

**1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2013:148), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh laporan keuangan tahun berlaku SAP yang terdapat di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yaitu pada tahun 2013 – 2014.

## **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2013:149), "Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen catatan akuntansi serta data lain yang berhubungan dengan laporan keuangan dari tahun 2013 dan 2014 pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional bertujuan untuk menghindari adanya kerancuan makna dari variable-variable yang digunakan. Oleh karena itu diperlukan penjelasan defenisi masing-masing variable sebagai berikut :

1. Prosedur Akuntansi Keuangan yang terdiri dari beberapa Instrumen diantaranya, harus adanya Kebijakan Akuntansi, Kode Akun, Standart Jurnal, Proses Pencatatan dari Transaksi, Jurnal, Buku Besar dan Trial Balance dimana harus bersifat Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas agar penyusunan.

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2006 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang dilakukan peneliti adalah data kuantitatif, menurut Sugiyono (2012 : 14) “ Data Kuantitatif adalah data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama kalinya yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui pengamatan dan wawancara.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data yang data sekunder.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari perusahaan dalam bahan yang sudah jadi seperti data dokumen, catatan akuntansi dan laporan keuangan yang ada pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dapat dilakukan dengan:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Sugiyono, 2013:118). Melalui wawancara ini pula peneliti mendapatkan informasi secara jelas dan akurat mengenai kinerja keuangan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

## **2. Studi Dokumentasi**

Studi Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan catatan dokumentasi serta data lainya dalam perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

### **D.Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan setelah data tersebut diperoleh dari penelitian. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini berupa metode analisis deskriptif. Metode analisis data dilakukan dengan cara melakukan, menganalisis, membandingkan dan menginterpretasikan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Donald E.Kieso,2007,*Intermediate Accounting*,Penerbit Erlangga,Jakarta
- Hadibroto S,1995, *Masalah Akuntansi, Buku Satu*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta
- Harison, Rubinson, and Secokusumo, *Akuntansi di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta,1997
- Hery,2012,*Akuntansi Keuangan Menengah 1*,Sinar Grafika Offset,Jakarta
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35079/7/Cover.pdf>, diakses pada tanggal 7 oktober 2015
- Husnan Suad, Enny Pudjiastuti, *Akuntansi Keuangan, Edisi Keempat*,Liberty, Yogyakarta,2005
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, *Standart Akuntansi Keuangan*, Salemba, Jakarta
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian, Cetakan Pertama*, Penerbit Ghalia, Indonesia Jakarta
- Sugiarto,2002,*Pengantar Akuntansi*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta
- Sugiyono,2013,*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*,CV Alfabeta, Bandung
- Tanjung, H. Abdul , 2012, *Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPD*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Terry D.Warfield,2007,*Akuntansi Intermediate*,Penerbit Erlangga,Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Praturan Pemerintah*, Jakarta